



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 44 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);

14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216);
15. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 30);
16. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/829/404.012/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - f. menandatangani SPM LS dan SPM TU;
 - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 4.01.01.2.08

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN, Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang bersangkutan.

DAFTAR KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Nama / NIP	Kode Rekening	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Honorarium per Bulan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Tata Pemerintahan	ACHMAD ROY ROZANO, S.STP. NIP 19770607 199612 1 002	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.094.372.500,00	1.080.000,00	
			4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	98.620.000,00		
			4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	626.715.000,00		
			4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	369.037.500,00		
			4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	487.710.500,00		
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Tata Pemerintahan	CERIANING WRAHADNALA DEWI NIP 19850526 200901 2 005	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	487.710.500,00	500.000,00	
			4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	1.094.372.500,00		
			4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	98.620.000,00		
			4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	626.715.000,00		
			4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	369.037.500,00		
2.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Hukum	APRIANA KUSUMANINGRUM, S.H., M.Hum. NIP 19800406 200501 2 015	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	1.397.581.000,00	1.080.000,00	
			4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.219.784.000,00		
			4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	106.815.000,00		
			4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	70.982.000,00		
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Hukum	DOMNINA KIMIASTUTI, A.Md. NIP 19841012 200901 2 008	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.	1.397.581.000,00	500.000,00	
			4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.219.784.000,00		
			4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	106.815.000,00		
			4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum	70.982.000,00		
	3.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat	Drs. SUTRISNO, M.M. NIP 19660505 199602 1 002	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.638.974.000,00	1.410.000,00
				4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.200.872.600,00	
4.01.02.2.02.02				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	425.004.400,00		
4.01.02.2.02.03				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	13.097.000,00		
b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Kesejahteraan Rakyat		CHOMARI NIP 19781002 200701 1 005	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	9.638.974.000,00	640.000,00	
			4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	9.200.872.600,00		
			4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	425.004.400,00		
			4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	13.097.000,00		

1	2	3	4	5	6	7
4.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Perekonomian	SRI WIDODO, S.P., M.MA. NIP 19650218 199203 1 003	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;	899.000.000,00	1.410.000,00
			4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	270.700.000,00	
			4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	397.600.000,00	
			4.01.03.2.01.03	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	120.000.000,00	
			4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	110.700.000,00	
			4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.511.000.000,00	
			4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4.140.000.000,00	
			4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	157.500.000,00	
			4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	213.500.000,00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perekonomian	ERLINDA RAHMANITA, S.STP. NIP 19940920 201808 2 001	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian;	899.000.000,00	640.000,00
			4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	270.700.000,00	
			4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	397.600.000,00	
			4.01.03.2.01.03	Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	120.000.000,00	
			4.01.03.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan pembentukan BLUD	110.700.000,00	
			4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.511.000.000,00	
			4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4.140.000.000,00	
			4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	157.500.000,00	
			4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air	213.500.000,00	
5.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan	IRWAN ESTI CAHYONO, S.Hut., M.H. NIP 19740811 200003 1 003	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.238.000,00	1.080.000,00
			4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.497.000,00	
			4.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.741.000,00	
			4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	1.239.295.000,00	
			4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program pembangunan	314.650.000,00	
			4.01.03.2.02.02	Pengendalian Dan Evaluasi Program pembangunan	487.006.000,00	
			4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	437.639.000,00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Administrasi Pembangunan	SUYANTI NIP 19661217 199703 2 001	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.238.000,00	500.000,00
			4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	78.497.000,00	
			4.01.01.2.01.02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.741.000,00	
			4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	1.239.295.000,00	
			4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program pembangunan	314.650.000,00	
			4.01.03.2.02.02	Pengendalian Dan Evaluasi Program pembangunan	487.006.000,00	
			4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	437.639.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
6.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	MAMIK SUBAGYO, S.E., M.M. NIP 19740424 200212 1 007	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	1.371.448.000,00	1.080.000,00
			4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan barang dan Jasa	935.973.000,00	
			4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	107.275.000,00	
			4.01.03.2.03.03	Pembinaan Dan Advokasi pengadaan Barang Dan Jasa	328.200.000,00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TAUFIK NIP 19850608 201001 1 003	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.	1.371.448.000,00	500.000,00
			4.01.03.2.03.01	Pengelolaan pengadaan barang dan Jasa	935.973.000,00	
			4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	107.275.000,00	
			4.01.03.2.03.03	Pembinaan Dan Advokasi pengadaan Barang Dan Jasa	328.200.000,00	
7.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Organisasi	HARI WAHONO, S.STP., M.I.Kom. NIP 19760410 199612 1 002	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi.	1.111.028.000,00	1.080.000,00
			4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	329.075.000,00	
			4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	218.725.000,00	
			4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	416.400.000,00	
			4.01.01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	123.040.000,00	
	4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	23.788.000,00			
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Organisasi	OVA RISELLA KUNCORO NIP 19860430 201001 2 001	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi.	1.111.028.000,00	500.000,00
			4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	329.075.000,00	
			4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	218.725.000,00	
			4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	416.400.000,00	
4.01.01.2.13.04			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	123.040.000,00		
4.01.01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	23.788.000,00				
8.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Umum	SUYANTO, S.H., M.M. NIP 19780206 199703 1 001	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.302.998.053,00	2.090.000,00
			4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.295.329.053,00	
			4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.826.500,00	
			4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.842.500,00	
			4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.204.000,00	
			4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.504.000,00	
			4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	449.700.000,00	
			4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.754.750.685,00	
			4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.995.200,00	
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.803.385,00	
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.286.000,00	
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	202.095.900,00	
			4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	179.700.000,00	
4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	799.870.200,00				

1	2	3	4	5	6	7
			4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.996.281.800,00	
			4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.290.000.000,00	
			4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	947.404.000,00	
			4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	195.142.000,00	
			4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.886.800,00	
			4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	437.849.000,00	
			4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.017.743.800,00	
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.638.587.500,00	
			4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	989.796.300,00	
			4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.860.000,00	
			4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.692.162.600,00	
			4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.000.000,00	
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	612.000.000,00	
			4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	
			4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	
			4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.489.672.600,00	
			4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.490.000,00	
			4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	828.082.802,00	
			4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	228.082.802,00	
			4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	
			4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.626.252.700,00	
			4.01.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.778.539.600,00	
			4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	847.713.100,00	
			4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.302.998.053,00	980.000,00
			4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.295.329.053,00	
			4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.826.500,00	
			4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.842.500,00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Umum	YULIATI, S.E. NIP 19860616 201101 2 037				

1	2	3	4	5	6	7
			4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	480.204.000,00	
			4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.504.000,00	
			4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	449.700.000,00	
			4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.754.750.685,00	
			4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.995.200,00	
			4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.803.385,00	
			4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.286.000,00	
			4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	202.095.900,00	
			4.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	179.700.000,00	
			4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	799.870.200,00	
			4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.643.909.400,00	
			4.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.290.000.000,00	
			4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	947.404.000,00	
			4.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	195.142.000,00	
			4.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	125.886.800,00	
			4.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	437.849.000,00	
			4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.017.743.800,00	
			4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
			4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	2.638.587.500,00	
			4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	989.796.300,00	
			4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	387.860.000,00	
			4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.692.162.600,00	
			4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	352.000.000,00	
			4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	612.000.000,00	
			4.01.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	
			4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	
			4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.489.672.600,00	
			4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.490.000,00	
			4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	828.082.802,00	
			4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	228.082.802,00	
			4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	

1	2	3	4	5	6	7
9.	a. Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Drs. MAHMUD ROSADI NIP 19730706 199311 1 001	4.01.01.2.12 4.01.01.2.12.01 4.01.01.2.12.03	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	3.626.252.700,00 2.778.539.600,00 847.713.100,00	1.245.000,00
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	APRIANTI, S.IP. NIP 19840407 201101 2 014	4.01.01.2.14 4.01.01.2.14.01 4.01.01.2.14.02 4.01.01.2.14.03 4.01.01.2.14 4.01.01.2.14.01 4.01.01.2.14.02 4.01.01.2.14.03	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3.856.628.500,00 707.335.000,00 2.345.548.500,00 803.745.000,00 3.856.628.500,00 707.335.000,00 2.345.548.500,00 803.745.000,00	570.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO